



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,82 / 95,53%

Jumlah	100 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 58	
	PEREMPUAN : 42	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 1	
	SD : 0	Diploma 3 : 0
	SMP : 0	S1 : 76
	SMU : 21	S2 : 2
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 52	SWASTA : 0
	TNI : 0	WIRUSAHA : 1
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 47	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,610
2. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,780
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,800

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Tindak lanjut terhadap informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan adalah agar untuk lebih mensosialisasikan tarif/biaya perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada para pengguna layanan.
2. Tindak lanjut terhadap dihubungi oleh seseorang yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara adalah agar pimpinan untuk mempererat pengawasan dan melakukan pembinaan khusus terhadap seluruh pegawai petugas PTSP.
3. Tindak lanjut terhadap membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan adalah mempererat pengawasan terhadap gratifikasi dengan memutarakan aplikasi pengendalian gratifikasi secara berkala

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Jakarta, 1
 April 2022
 Direktur
 Jenderal
 Badan
 Peradilan
 Umum

PRIM
 HARYADI